

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abdul Ghofur Anshori, 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia; Perspektif Hukum dan Etika*, Ull Press, Yogyakarta.
- Achmad Ali, 2002. *Menguak Tabir Hukum; Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Gunung Agung, Jakarta.
- Ahmad Rifai, 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Abdul kadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti.
- Andi Hamzah, 2005. *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia.
- Dengsi Kristina, S.H., 2012. "pengaruh pengawasan dan pembinaan notaris terhadap pelanggaran yang sering terjadi di DKI Jakarta". Tesis Hukum, Universitas Indonesia Depok.
- G.H.S. Lumban Tobing, 1992. *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta : Erlangga.
- Habib Adjie, 2007. *Sanksi Perdata Dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung.
- , 2009. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refika Aditama.
- , 2011. *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Refika Aditama, Bandung.
- , *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-undang Jabatan Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Cetakan 2, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Herlien Budiono, 2007. *Notaris dan Kode Etiknya*, Upgrading dan Refreshing Course National Ikatan Notaris Indonesia, Medan.
- , 2007, *Kumpulan tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra aditya bakti, Bandung.

- Hadari Nawawi, 1996. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. (Gajah Mada University Press: Yogyakarta).
- I Dewa Gede Atmadja. 1996. *Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum: Sisi Pelaksanaan Uud 1945 Secara Murni Dan Konsekuen*. Universitas Udayana: Fakultas Hukum.
- Indroharto, 1993. *Usaha Mendalami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Harapan.
- Jimly Asshidiqie dan Ali Safaat, 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekertariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta.
- Lutfi Effendi, 2003. *Pokok-pokok Hukum Administrasi*, Bayu Media Publishing.
- M. Khozim. 2010. *Konsep Hukum, Nusamedia*, Bandung.
- Munir Fuady, 2010, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*, Prenada Media, Bandung.
- , 2002. *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nico, 2003. *Tanggungjawab Notaris selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and Studies of Business Law (CBDL), Yogyakarta.
- Philipus M. Hadjon, 2005. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesia Administrative Law)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- , 2010. *Hukum Administrasi Dan Good Governance*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Prajudi Atmosudirjo, 1981. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Raden Soegondo Notodisoerjo, 1982. *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, CV Rajawali, Jakarta.
- , 1993. *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan Cetakan 2*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Rudy T Erwin, J.C.T. Simorangkir dan J.T. Prasetyo, 1987, Kamus Hukum, Jakarta.

Ridwan H.R, 2003, *Hukum Adminstrasi Negara*. Yogyakarta.

-----, 2007. *Hukum administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ria Trisnomurti, 2012. “*Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Pengawasan Terhadap Notaris Sebagai Pemegang Protokol*”, Universitas Hasanuddin Makassar.

Sjaifurrachman, 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan akta*, Mandar Maju, Bandung.

Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.

Suharsini Arikunto, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka cipta.

Suhrawadi K.Lubis, 1994. *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sutrisno, 2007. *Tanggapan Terhadap Undang-undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (Bahan Kuliah Etika Profesi Notaris), MKn USU.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Cetakan ke-3, Jakarta.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

JURNAL HUKUM, WEBSITE

Asep Setiawan dan Gunarto Gun, “Analisis Yuridis Standar Prosedur Pelayanan Operasional (Sppop) Notaris Dalam Pembuatan Akta Terkait Klausul Proteksi Diri Notaris Berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. “ *Jurnal Akta* 1. 1 (2017).

Achmad Ma’arif 2011. “*Implementasi Kode Etik Notaris Dalam Aktivitas Notaris Sebagai Pejabat Umum*.” *Jurnal Hukum*, Universitas Diponegoro Semarang.

[https://metroballi.com/menganalisa-kembali-untuk-apa-dibentuk-tim-investigasi-notaris/\(http://ml.scribd.com/doc/170579596/Tiga-NilaiDasar-Hukum-MenurutGustavRadbruch\)](https://metroballi.com/menganalisa-kembali-untuk-apa-dibentuk-tim-investigasi-notaris/(http://ml.scribd.com/doc/170579596/Tiga-<u>NilaiDasar-Hukum-MenurutGustavRadbruch</u>)) diakses pada 1 Desember 2019.

<http://digilib.unila.ac.id/5055/17/BAB%20II.pdf> diakses pada 8 Desember 2019.

<https://shelembendumiso.files.wordpress.com/2014/08/conveyancing-law-for-paralegals-and-law-students.pdf> di akses pada 12 Desember 2019.

https://www.google.com/search?safe=strict&sxsrif=ALeKk00rnTzdfBmjQhSiP09THSBAkGDxw%3A1587547598252&ei=zg2qXvvnDs3dz7sPqLeVUA&q=tesis+pengawasan+tim+investigasi+notaris+universitas+indonesia&oq=tesis+pengawasan+tim+investigasi+notaris+UNIVERSITAS&gs_lcp=CgZwc3ktYWlQAxgAMgUllRCgAToEC CMQJzoECCEQFToHCCEQChCgAVDguwNYvqcEYIq4BGgBcAB4AIAB5gOIAb8ZkgEJMC44LjUuMS4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdppeg&sclient=psy-ab di akses pada 18 Desember 2019.

Lon L. Fuller. 1969. *The Morality of Law – revised edition*. Yale University Press: London. Hal 39 (<http://bookzz.org/book/831228/49d378/?ir=1>) Diakses pada 10 Mei 2019.

<https://www.ini.id/post/kemenkumham-tingkatkan-pembinaan-dan-pengawasan-Notaris-demi-profesionalitas> di akses pada 14 November 2019.

<https://sumsel.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/3727-rapat-evaluasi-dan-investigasi-Notaris-sudirman-rekomendasikan-pemecatan-bagi-Notaris-yang-terbukti-bermasalah-dengan-hukum> di akses pada 15 November 2019.

<https://metroballi.com/menganalisa-kembali-untuk-apa-dibentuk-tim-investigasi-Notaris/> di akses pada 19 November 2019.

http://eprints.undip.ac.id/23936/1/ERNA_RISTIANI.pdf, Diakses Pada Tanggal 08 Juli 2020.

PERATURAN UNDANG-UNDANG:

Keberatan adalah banding sebagaimana disebut dalam Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 71 huruf f UUJN.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Jabatan Notaris UUJN.

Pasal 38-39 Undang-Undang No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 Tentang *KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.*

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02,PR.08.10 Tahun 2004, keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 39-PW.07.10 Tahun 2004, Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris

Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02,PR.08.10 Tahun 2004.

